

SKRIPSI

PEMANFAATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM  
MENINGKATKAN TATA KOTA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diusulkan Oleh :

JANWAR RACHMAT DG. SIBALE ABAS

Nomor Stambuk :105640232315



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

PEMANFAATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM MENINGKATKAN TATA KOTA DI KOTA  
MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Janwar Rachmat Dg. Sibale Abas

Nomor Stambuk : 105640232315

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

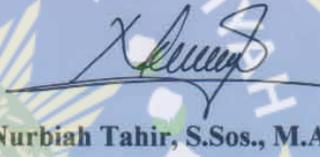
Judul Skripsi : Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Tata Kota Di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Janwar Rachmat Dg. Sibale Abas  
Nomor Stambuk : 105640232315  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

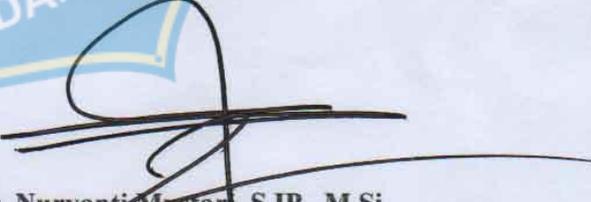
  
Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustar, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0054/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

1. Dr. Jaelan Usman, M. Si (Ketua)

  
(.....)

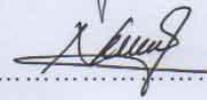
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M. Si

  
(.....)

3. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI

  
(.....)

4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Janwar Rachmat Dg.Sibale Abas

Nomor Stambuk : 105640232315

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Mei 2019

Yang menyatakan

Janwar Rachmat Dg.Sibale Abas

## ABSTRAK

**Janwar Rachmat Dg.Sibale Abas. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Tata Kota Di Kota Makassar** (dibimbing oleh Dr.Hj. Budi Setiawati dan Nurbiah Tahir)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe Femonologi. Dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Wibisono berdasarkan Keuntungan (*profit*), Manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya (a) *profit* atau Keuntungan, menunjukkan bahwa terdapat adanya keuntungan terkait kerjasama Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bahan promosi mengenai kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). (b) *People* atau masyarakat saat ini sangat setuju dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan *Center Point* dan antusias berkunjung untuk menikmati alam sekitar berbagai area disediakan sehingga masyarakat merasakan nyaman. hal ini salah satu tujuan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) masyarakat dapat menikmati ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan *Center Point*. (c) *Planet* atau lingkungan mengenai lingkungan terkait kerjasama Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bahwa dampak lingkungan belum dapat dirasakan tetapi masyarakat mengharapkan dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) dapat mengurangi dampak dan dapat membuat lingkungan sekitar menjadi sehat dan nyaman.

**Kata kunci :** *Corporate Sosial Responsibility*, Ruang Terbuka Hijau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar ”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, Alm.ibunda Djani Abas dan ayahanda Dg. Sibale atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I dan ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
5. Pihak Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepada seluruh keluarga besar fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada satu angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan terkhusus kelas G,. Baso, Rifki, Fahrudin, Musakkar, Aswar, Ardi, Cahya, Ayu, Innah, Eggha, Nunu, Riska, Dewi, Dillah, Elma, Kiki, Fatma, Rahma, Almukram, Siska, Aldi, Karmin, Syakir, Fahrudin, Wahyudi, Vista, Rizal, Wahdania, Akbar, Hamzah, Fani, dan teman-teman kelas ku yang tidak bisa saya sebutkan semua namanya.

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 19 Mei 2019

Janwar Rachmat Dg. Sibale Abas



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	7
B. Model Pelaksanaan CSR di Indonesia .....	12
C. Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	14
D. Manfaat CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	16
E. Pengertian Tata Kota.....	18
F. Kerangka Pikir .....	21
G. Fokus Penelitian.....	22
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Informan Penelitian.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	31

B. Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Meningkatkan Tata Kota Makassar.....	59
C. Faktor Pendukung dan penghambat pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Meningkatkan Tata Kota Makassar. ....	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini kota merupakan pusat kegiatan dari berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kota semakin tahun mengalami kepadatan penduduk yang jumlahnya semakin meningkat, keadaan itu membuat terjadinya tingginya pembangunan di kota. Kegiatan pembangunan di kota terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari meningkatnya kegiatan pembangunan di kota menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Melihat kondisi sekarang di kota Makassar mengalami perkembangan pembangunan yang terus meningkat sehingga kebutuhan lahan terus meningkat. Jika melihat kondisi di kota Makassar sekarang ini dengan slogan Makassar Menuju Kota Dunia, banyak tantangan yang kemudian yang akan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kota Makassar terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya (Tahir, Muchlas M dan Nahrudin, 2017).

Ruang Terbuka Hijau termasuk sesuatu hal yang penting bagi kota dan masyarakat sebagai menambah keindahan kota dan sebagai produksi oksigen dan karbondioksida untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum (Budiharjo, Eko dan Sujarto, 2009).

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu ruang publik di perkotaan harus memiliki luasan minimal yang ideal yaitu 30% dari luas total suatu wilayah kota, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Jika melihat kondisi di Makassar saat ini ruang terbuka hijau masih jauh dari standart proposi ruang terbuka hijau pada setiap kota minimal 30 % (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Kota Makassar hanya mencapai 13 persen. Dalam pemanfaatan dan penyediaan ruang terbuka hijau dibutuhkan adanya peran dari berbagai pihak seperti pihak swasta berkerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam memelihara dan membangun ruang terbuka hijau serta membantu pendanaan terhadap ruang terbuka hijau. Salah satu peran pihak swasta adalah melalui program CSR.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teori, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut (Pratama Ardi, Yerima dan Widjaya, 2008)

Pada umumnya konsep *Corporate Social Responsibility* adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR merupakan konsekuensi dari dampak keputusan atau kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah mengembalikan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut menjadi lebih baik (Prastowo, Joko dan Miftachul, 2011).

Pemerintah kota Makassar mengambil tindakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menerima *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban perusahaan yang bertanggung jawab bukan hanya untuk konsumen, pemegang saham, ataupun karyawannya. Kini perusahaan juga melakukan program CSR kepada lingkungan sekitar.

Hal ini sebagaimana sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi-korporasi untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan.

Salah satu perusahaan yang berkaitan dengan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK) melakukan kerjasama dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan melakukan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Rencana proyek *landmark* di Kota Makassar dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena masuk dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal masyarakat umum *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang di jelaskan dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan.

Berupa kegiatan pelestarian lingkungan melalui pemberian hibah bangunan dan Landmark yang di dalamnya terdapat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai sarana rekreasi, serta sosialisasi dan edukasi program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat dari *Corporate Sosial Responsibility* itu sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan untuk sekitar kawasan *Center Point of* Indonesia.

*Landmark* merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan ruang terbuka hijau di beberapa kota di Indonesia. Hal ini menjadi kewajiban perusahaan BPJS TK melakukan *Corporate Sosial Responsibility*

dengan melakukan nota kesepahaman pengadaan ruang terbuka hijau (REPUBLIKA.co.id,2019)

Hal ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat, selain fokus kepada perlindungan pekerja tetapi mencari kebutuhan masyarakat yang lain. Salah satunya adalah membangun sebuah Landmark BPJS Ketenagakerjaan. Ruang terbuka hijau salah satu program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility* (SINDONEWS.com,2017). Oleh karena itu penelitian bertujuan mengetahui perkembangan ***Pemanfaatan Corporate Sosial Responsibility dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.***

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

### C. Manfaat Penelitian

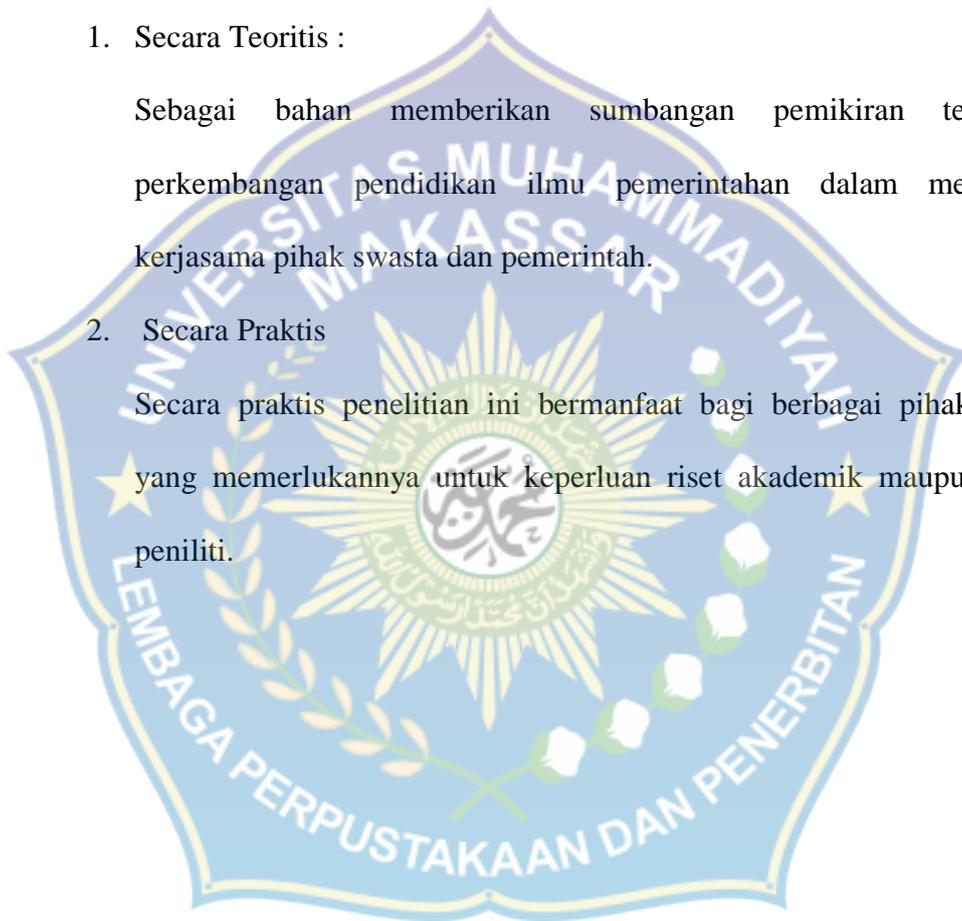
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Sebagai bahan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pendidikan ilmu pemerintahan dalam mengenai kerjasama pihak swasta dan pemerintah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak-pihak yang memerlukannya untuk keperluan riset akademik maupun bagi peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* atau (CSR) adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetap juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR adalah bagian dari *policy* perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik sebagai suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian diantaranya :

##### 1. Keuntungan (*profit*)

Pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

##### 2. Manusia (*people*)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Perusahaan sudah semestinya mengelola lebih santun dan arif

*community relationship*, dalam hal ini bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bersifat syarat perlu (*necessary condition*), yang didasarkan atas pilihan sendiri, bukan karena “dipaksa” oleh aturan atau “tekanan” masyarakat dan datang dari niat baik yang tulus, dalam konteks ini ada ‘nuansa kenabian’, nuansa berempati dan berbagi dengan masyarakat. Perusahaan perlu memandang bahwa CSR adalah investasi masa depan, artinya CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*), melainkan sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang, karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan.

### 3. lingkungan (*planet*)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita, sebaliknya jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Sebagian besar kita kurang peduli dengan lingkungan sekitar, hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya, padahal dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya (Wibisono, 2007).

Adapun yang menjelaskan mengenai *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam

rangka memperbaiki kualitas hidup (Rahman, 2009). *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Ardianto, Elvinaro dan Muchfudz, 2011).

*Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Wahyudi, 2008). Dari definisi (CSR) di atas, tanggung jawab sosial perusahaan atau (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah kerja perusahaan tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut (Pratama Ardi, Yeremia dan Widjaya, 2008).

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

*The World Business Council For Sustainable Development/WBCSD*, CSR atau Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas local dan masyarakat secara lebih luas. Konsep ini menawarkan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan.

Pada umumnya konsep *Corporate Social Responsibility* adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu tidak disengaja apalagi yang disengaja.

Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR merupakan konsekuensi dari dampak keputusan atau kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah mengembalikan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut menjadi lebih baik (Prastowo, Joko dan Miftachul, 2011). *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah konsep yang masih tetap kontroversial bagi kalangan pebisnis maupun akademisi. Sebuah justifikasi logis diutarakan oleh kelompok yang mendukung pelaksanaan CSR mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi

masyarakat di sekitarnya. Kelompok yang mendukung ini berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi perusahaannya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan (Suharto, 2009).

Penerapan program *Corporate Social Responsibility* saat ini berada pada fase pertumbuhan terutama di Indonesia, meskipun dalam disiplin ilmu wacana tentang CSR masih dalam perdebatan, baik dari sudut pandang konsep, idealitas, pengaturan maupun tata cara pengimplementasian. Di satu sisi, program CSR merupakan kegiatan wajib bagi perusahaan akibat kebutuhan untuk mempertahankan reputasi perusahaan agar perusahaan tersebut memiliki citra yang sangat positif di mata publik karena hal tersebut akan mempengaruhi *corporate image*, *brand image* maupun *brand loyalty* (Solihin, 2009).

Pada tingkat lanjut, CSR nyatanya kini memasuki fase kemajuan di mana konsep tersebut tidak lagi dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. Dari yang semula dianggap sebagai *cost*, kini mulai diposisikan sebagai investasi sosial. Banyak perusahaan mempersoalkan dampak program CSR pada *profit* perusahaan. Para pelaku dituntut untuk ikut memikirkan program yang mampu mendukung *sustainability* perusahaan dan aktifitas CSR itu sendiri. Philip Kotler, dalam buku "*CSR: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*" membeberkan beberapa alasan tentang perlunya perusahaan menggelar aktifitas itu.

Di lain sisi, menurut Friedman (Solihin, 2009), Tanggungjawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan atau para *shareholder* dalam menghasilkan uang sebanyak mungkin yang sejalan dengan tujuan utama dari perusahaan korporasi tersebut, yaitu memaksimalkan laba atau nilai pemegang saham (*shareholder's value*). Friedman bahkan memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat merupakan manajer yang bertindak tidak sejalan dengan keinginan para pemegang saham.

Asumsi ini juga masih diyakini oleh beberapa perusahaan bahwa aktivitas CSR hanya membuang biaya operasional dan waktu serta tidak memberikan dampak langsung yang signifikan bagi perusahaan. Mereka berpendapat bahwa tanggung jawab mereka hanyalah kepada *shareholders* untuk memberikan laba sebanyak-banyaknya bagi perusahaan sedangkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sudah diwakilkan melalui pajak yang telah disetorkan kepada pemerintah atas pajak bangunan usaha sehingga sisanya adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melakukan berbagai kebajikan kepada publik dan lingkungan.

## **B. Model Pelaksanaan CSR di Indonesia**

Model pelaksanaan praktek-praktek CSR di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh perusahaan melalui divisi *Human Resources Development* atau *Public Relations*. Di lain pihak, pola pelaksanaan CSR dilakukan perusahaan dengan membentuk yayasan yang terpisah dari induk organisasi namun tetap bertanggungjawab kepada direksi perusahaan. Pola-pola implementasi CSR

tersebut seperti dikatakan oleh Saidi dan Abidin bahwa sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia (Suharto, 2009):

1. Keterlibatan langsung: Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan: Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Coca Cola Company.
3. Bermitra dengan pihak lain: Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau NGO, instansi pemerintah, universitas, media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium: Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga sosial yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

### C. Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Dalam peraturan global, wacana tentang *Corporate Social Responsibility* sudah cukup lama diperbincangkan. Pembicaraan mulai ramai dilakukan pada tahun 1980-1990 an. Pelaksanaan CSR di dunia dimulai sejak adanya KTT Bumi di Rio de Janeiro. Di Indonesia wacana CSR baru diperbincangkan sekitar tahun 2000-an. *Corporate Social Responsibility* semakin hangat dibicarakan dengan adanya UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility* pun masih sangat beragam. Tidak sedikit di antara perusahaan yang melaksanakan kegiatan sosial seperti: membagi sembako, sunatan masal sudah merasa melaksanakan CSR.

Pada hal idealnya kegiatan *Corporate Social Responsibility* berkaitan dengan *core business* perusahaan, bukan hanya menyangkut *charity* atau donasi. Pada umumnya negara-negara maju memiliki regulasi mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, misalnya di bidang perburuhan, lingkungan dan hukum. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan dengan memenuhi standar tertentu sesuai dengan bidangnya dikatakan telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan demikian ada standarisasi yang dapat membedakan perusahaan sudah, belum maupun tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Bahkan di Inggris, perusahaan yang telah go public, di samping wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun juga wajib menyampaikan laporan di bidang *Corporate Social Responsibility* atau *social report / sustainability report*. Dengan menyampaikan *social / sustainability report*, maka publik akan

mengetahui kinerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan socialnya. Konsumen etis telah terbentuk di Eropa dan di negara maju lainnya.

Ketika membeli produk, mereka akan bertanya apakah produk yang dibeli dihasilkan dengan cara merusak alam atau tidak, memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tidak, produknya bajakan atau tidak, dan memenuhi standar lainnya atau tidak. Jepang sudah menerapkan kebijakan labelling sebagai kewajiban melaksanakan etika bisnis. Bagi perusahaan yang lolos audit yang terkait *Corporate Social Responsibility*, akan diberi label tersebut. Di Indonesia kebijakan seperti sertifikasi halal untuk produk makanan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan penghasil produk makanan nampaknya bukan merupakan kewajiban.

Hal ini menunjukkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di negara maju lebih maju dibandingkan di Indonesia. Regulasi perpajakan di negara-negara maju menguntungkan bagi perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Bahkan regulasi pajak di Philipina memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan berlomba-lomba melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Adapun dasar hukum mengenai *Corporate Social Responsibility*

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”).

#### **D. Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Menurut Lako (2011:95) komitmen perusahaan melaksanakan CSR secara berkelanjutan mendatangkan banyak manfaat, antara lain:

1. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan.
2. Memperkokoh kinerja keuangan perusahaan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas dan investor, kreditor, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat.
4. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.
5. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
6. Meningkatnya reputasi, goodwill dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Sudut pandang yang lebih terbuka mengenai pemanfaatan CSR telah sampai pada tujuan peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini merujuk pada upaya pemanfaatan CSR secara berkelanjutan agar program yang diberikan memberikan efek jangka panjang pada masyarakat. Meskipun CSR merupakan bagian dari komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pembangunan ekonomi berkelanjutan, namun CSR juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar

perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi secara proporsional dalam pencegahan kesalahan-kesalahan signifikan pada strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Sesuai dengan pendapat Elkington bahwa dalam menjalankan CSR, perusahaan wajib memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Keuntungan di sini harus dimiliki perusahaan agar tingkat *profitabilitas* memadai, sebab merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan atau melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Dana CSR dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan sebagainya. Menurut Ambadar mengungkapkan Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat (Ambadar, 2008). Sedangkan menurut Rogovsky dalam (Wibisono, 2007) menunjukkan beberapa manfaat CSR sebagai berikut:

1. Manfaat bagi individu karyawan; CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada, memperoleh keterampilan baru, memperbaiki

pengetahuan perusahaan tentang komunitas lokal, memberikan kontribusi bagi komunitas lokal, dan mendapatkan persepsi baru atas bisnis yang dilakukan.

2. Manfaat bagi penerima program; CSR dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah, dan memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis.
3. Manfaat bagi perusahaan; CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama komunitas: peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal, meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan.

#### **E. Pengertian Tata Kota**

Tata Kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pola tata perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah Kota dalam membangun, misalnya : jalan, taman, tempat usaha dan tempat tinggal agar Kota terlihat indah, nyaman dan lingkungan yang sehat.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk

lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

7. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal (Witoelar, 2007).

Tata ruang kota dan wilayah itu adalah menentukan, merencanakan, dan memastikan bagaimana penggunaan ruang secara proporsional sehingga area yang ada di Jakarta dapat memenuhi aspek kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan

hidup pada kawasan kota tersebut ketiga aspek tersebut sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan pada masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut(Darwani,2005:87).

Menurut UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya .

Sedangkan menurut Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan, Ruang adalah wadah meliputi darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum (Budiharjo, Eko dan Sujarto, 2009).

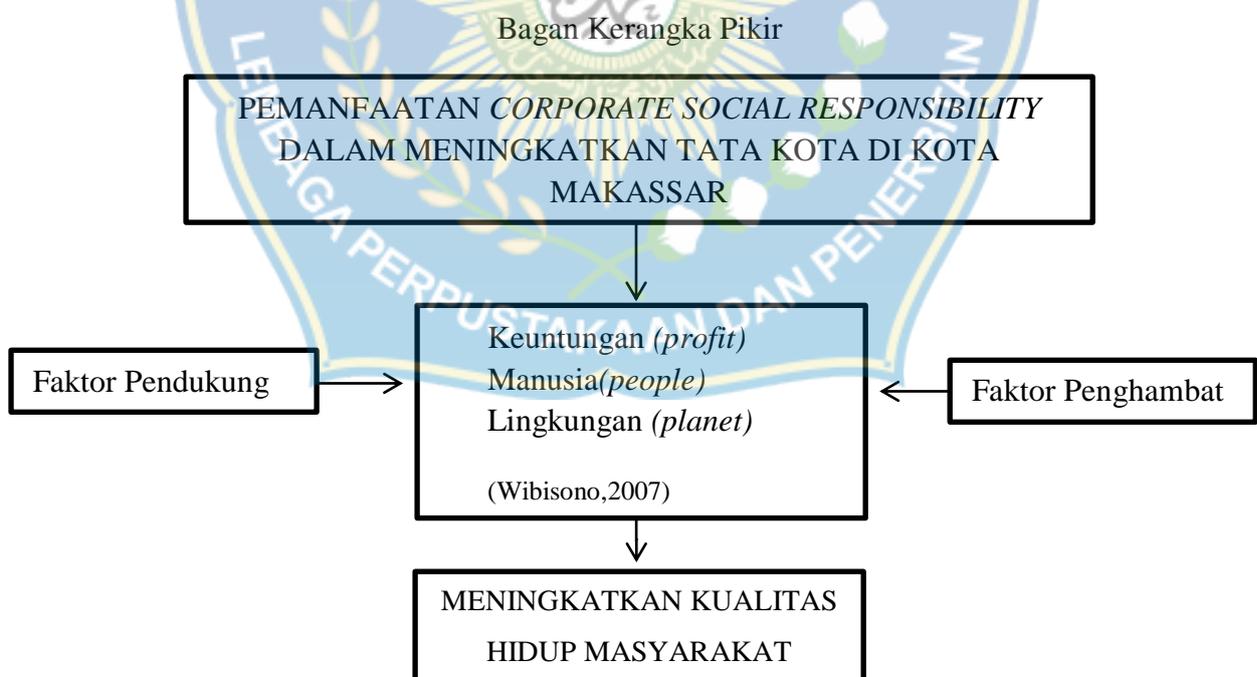
Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan manfaat ruang terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
- c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga, dan buah.

Tata ruang kota dan wilayah itu adalah suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut(Hidayat, 2015)

## F. Kerangka Pikir

*Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetap juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR adalah bagian dari policy perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik sebagai suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian diantaranya: Keuntungan(*profit*), Manusia(*people*) dan Lingkungan (*planet*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### G. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar yang meliputi indikator yaitu keuntungan, masyarakat dan lingkungan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari Pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

### H. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari kerangka pikir penelitian, yang menjadi fokus penelitian saya yaitu Dalam konteks CSR adalah bagian dari perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik sebagai suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian diantaranya:

#### 1. Keuntungan (*profit*)

Keuntungan dimaksudkan bahwa tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup oleh pelaksana *Corporate Sosial Responsibility*, seperti untuk meningkatkan keuntungan antara lain dengan cara meningkatkan produktivitas yang baik dari segi pendapatan pihak pelaksana maupun masyarakat yang merasakan dampaknya dari *Corporate Sosial Responsibility*, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

#### 2. Manusia (*people*)

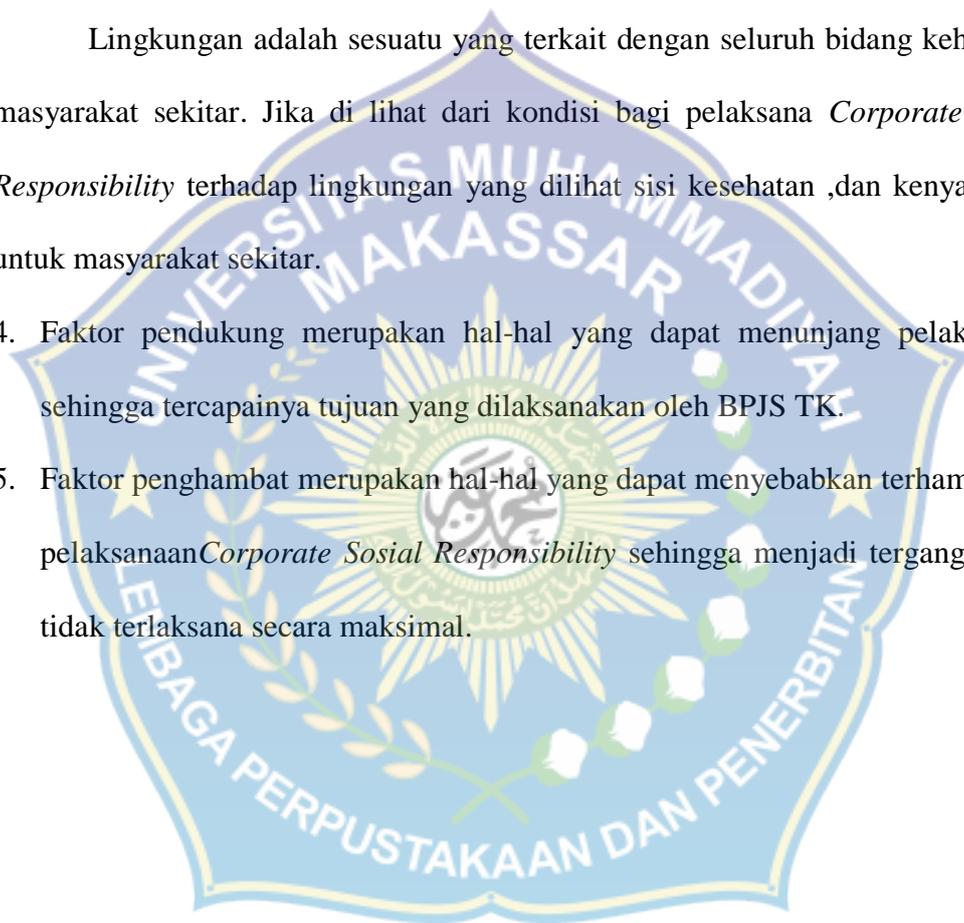
Masyarakat merupakan *stakeholder* penting sebagai pendukung pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility*, seperti keberadaan, kelangsungan

hidup dan perkembangan bagi pihak pelaksana *Corporate Sosial Responsibility*, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

### 3. lingkungan (*planet*)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan masyarakat sekitar. Jika di lihat dari kondisi bagi pelaksana *Corporate Sosial Responsibility* terhadap lingkungan yang dilihat sisi kesehatan ,dan kenyamanan untuk masyarakat sekitar.

4. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan sehingga tercapainya tujuan yang dilaksanakan oleh BPJS TK.
5. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* sehingga menjadi terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 (dua) bulan terhitung setelah pelaksanaan seminar proposal dan lokasi penelitian dilaksanakan di BPJS TK Kota Makassar, dengan pertimbangan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal. Selain itu penelitian dilakukan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar (BPJS TK), karena ingin tahu seberapa jauh tindakan yang dilakukan BPJS TK dalam meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis

data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang di gunakan adalah Fenomenologi. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Alsa, 2004) peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu.

Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukkan pada pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang (Moleong, 2009).

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010) yang menyatakan bahwa :“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak di Kantor BPJS TK Makassar.

#### **b. Data sekunder**

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai

topik penelitian. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari Kantor BPJS TK Makassar. Jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data ini berupa dokumen, buku, majalah, jurnal dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang sulit dan melelahkan karena data yang diambil dalam penelitian haruslah objektif. Oleh karenanya penulis memilih beberapa metode, antara lain :

##### **1. Observasi**

Metode observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan.

Hal ini dilakukan dalam observasi ini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk memperjelas alur pembahasan, selain peneliti juga melakukan percakapan (dialog) dengan informan dalam suatu penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data, karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari pihak *Corporate Social Responsibility* BPJS TK dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### **E. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan terdiri dari informan kunci. Informan kunci ( *Key Informan* ) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar.

Tabel. 3.1. Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Hari	Bidang Kepesertaan	1
2	Amaluddin ZM	Bidang Umum dan SDM	1
3	Risnawati	Masyarakat	1
4	Andra	Masyarakat	1
5	Riswan	Pedagang	1
6	Ayu	Pedagang	1
<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan dituliskan/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
2. *Data Display* (Penyajian Data), selanjutnya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi.
3. *Conclusion Drawing/Verification*, langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan,

dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2010)

### **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

#### **1. Triangulasi**

Pengujian kebenaran informasi dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan tiga triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- b. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

- c. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari.

2. Mengadakan *membercheck*

Hal ini dilakukan berupa pengevaluasian data kembali oleh peneliti atas data yang diperoleh dari informan apakah jawaban yang diberikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi sehingga data yang di peroleh adalah data akurat (Sugiyono, 2010)



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama

Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

Luas dan batas wilayah administrasi Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Maros
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
3. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
4. Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar memiliki 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Adapun untuk administratif lainnya, Kota 50 Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964

RT (BPS, 2017). Untuk pembagian administratif, Kota Makassar dengan luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> terbagi atas 15 wilayah kecamatan. Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan 48,22 km<sup>2</sup> dan 27,43% luas keseluruhan Kota Makassar. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 1,54 km<sup>2</sup> dan 0,88% luas keseluruhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 8 berikut. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel.4.1

Luas Wilayah dan Presentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	4,40	2,50
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakukang	17,05	9,70
12	Manggala	14,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Talamanrea	32,84	18,11
15	Kepulauan Sangkarrang	1,54	0,88
	<b>TOTAL</b>	<b>175,77</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Makassar Dalam Angka 2017, BPS 2017

#### Kondisi Fisik Wilayah

Kota Makassar secara topografi berada pada dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 1-22 meter di atas permukaan laut (BPS, 2017).



luas wilayah 2,52 km<sup>2</sup> atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0–25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.

Geologi wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk lahan. Satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Satuan morfologi dataran aluvial pantai; dan
- b. Satuan morfologi perbukitan bergelombang.

Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur batuan ini penyebarannya dapat

dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, Daya, dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung, dan gamping.

Hidrologi Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene'berang yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m<sup>3</sup> /detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m<sup>3</sup> /detik di musim kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di laut.

Klimatologi Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga Februari. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah kota ini. Selain itu, kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

Penggunaan lahan secara umum, konteks pola ruang Kota Makassar mencakup Wilayah Kota Makassar yang memiliki 14 (empat belas) kecamatan dimana didalamnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.

#### A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah, secara substansial penetapan kawasan lindung mengakomodasi kawasan-kawasan berikut:

##### a) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup kawasan resapan air. Daerah resapan air di Kota Makassar berada di kawasan Lakkang dan sekitarnya di Kecamatan Tallo serta danau Balang Tonjong dan sekitarnya di Kecamatan Panakkukang yang selama ini menjadi kawasan prioritasnya. Berikut daerah resapan air dan lokasi resapan air di Kota Makassar

Tabel.4.3

Daerah Resapan Air (Ha) Berdasarkan Jenis ,2009

Total Luasan	Danau	Rawa	Sungai
	84,95105999	382,6467371	530,198464

Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030

Tabel.4.4

## Lokasi Resapan Air di Kota Makassar

No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kelurahan Bangkala	0,747427325
2.	Kelurahan Batua	0,184961187
3.	Kelurahan Manggala	0,488360927
4.	Kelurahan Tamangapa	3,464905307
Total Luasan		4,885654745

Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030

## b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk. Kawasan perlindungan setempat dalam wilayah Kota Makassar diuraikan sebagai berikut :

1. Kawasan sempadan pantai Kota Makassar merupakan daerah tepian pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) kilometer dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kota Makassar. Secara fungsi, bagian dari kawasan sempadan pantai di Kota Makassar adalah kawasan hutan mangrove yang lokasinya berada di wilayah pesisir laut bagian utara (Pantai Untia) dan merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Berikut perincian lokasi dan luasan kawasan sempadan pantai di Kota Makassar :

Tabel.4.5

Lokasi dan Luasan Kawasan Sempadan Pantai di Kota Makassar

No	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kelurahan Barombong	0,101819
2.	Kelurahan Barrang Caddi	0,389254
3.	Kelurahan Barrang Lompo	0,108916
4.	Kelurahan Bira	0,076923
5.	Kelurahan Bulogading	0,053269
6.	Kelurahan Butung	0,008841
7.	Kelurahan Cambaya	0,012848
8.	Kelurahan Ende	0,007823
9.	Kelurahan Gusung	0,041896
10.	Kelurahan Kaluku Bodoa	0,463634
11.	Kelurahan Kodingareng	0,158129
12.	Kelurahan Lae-Lae	0,310212
13.	Kelurahan Losari	0,005004
14.	Kelurahan Maccini Sombala	0,276499
15.	Kelurahan Maloku	0,015084
16.	Kelurahan Mampu	0,007887
17.	Kelurahan Melayu Baru	0,016196
18.	Kelurahan Panambungan	0,025613
19.	Kelurahan Parangloe	0,357303
20.	Kelurahan Pattunuang	0,014725
21.	Kelurahan Tallo	0,181179
22.	Kelurahan Tamalabba	0,020724
23.	Kelurahan Tanjung Merdeka	0,162636
24.	Kelurahan Totaka	0,005611
25.	Kelurahan Ujung Tanah	0,034267
26.	Kelurahan Untia	0,394524
<b>TOTAL LUASAN</b>		<b>3,250817</b>

Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030

2. Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai yang memiliki fungsi utama melindungi sungai dari gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar kaki tanggul pada sungai dalam kawasan perkotaan dan 5 (lima) meter di sebelah luar kaki tanggul pada sungai di luar kawasan perkotaan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung, sempadan sungai ditetapkan pada kawasan yang sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan anak

sungai yang berada di luar permukiman. Selanjutnya, dalam arah rencana penetapannya sepanjang koridor Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo merupakan kawasan sempadan sungai di Makassar.

Tabel.4.6

## Lokasi dan Luasan Resapan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Makassar

No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kel. Antang	0,046575899	43.	Kel. Mappala	0,003268455
2.	Kel. Bajimapakasunggu	0,000535795	44.	Kel. Maradekaya	0,001198057
3.	Kel. Bala Parang	0,000621424	45.	Kel. Maradekaya Utara	0,001517059
4.	Kel. Balangbaru	0,0255051	46.	Kel. Maricaya Baru	0,001812231
5.	Kel. Bangkala	0,012493875	47.	Kel. Maricaya Selatan	0,002773441
6.	Kel. Banta-bantaeng	0,000932912	48.	Kel. Mario	0,000848053
7.	Kel. Bara Baraya	0,000570648	49.	Kel. Mariso	0,001959759
8.	Kel. Bara Baraya Selatan	0,004295095	50.	Kel. Matoanging	0,00879035
9.	Kel. Bara Baraya Timur	0,003059515	51.	Kel. Pa'baeng baeng	0,003416476
10.	Kel. Barana	0,002471428	52.	Kel. Pa'batang	0,000686848
11.	Kel. Baraya	0,001687349	53.	Kel. Paccerakkang	0,11544943
12.	Kel. Barombong	0,129459742	54.	Kel. Pai	0,001631895
13.	Kel. Batua	0,009976292	55.	Kel. Pampang	0,13539789
14.	Kel. Bira	0,044349443	56.	Kel. Panaikang	0,046440575
15.	Kel. Bontolebang	0,003007384	57.	Kel. Panambungan	0,004769824
16.	Kel. Bontorannu	0,029572939	58.	Kel. Pandang	0,003774373
17.	Kel. Borong	0,003061849	59.	Kel. Pannampu	0,000504844
18.	Kel. Buloa	0,015838067	60.	Kel. Parang	0,00151244
19.	Kel. Bulurokeng	0,099585976	61.	Kel. Parangloe	0,248326432
20.	Kel. Bunga Eja Baru	0,002516477	62.	Kel. Parangtambung	0,045396191
21.	Kel. Bungaya	0,001662902	63.	Kel. Paropo	0,008828236
22.	Kel. Daya	0,076712397	64.	Kel. Pattingalloang	0,001233688
23.	Kel. Gunung Sari	0,013380676	65.	Kel. Rappocini	0,002313217
24.	Kel. Gusung	0,001733054	66.	Kel. Rappokalling	0,010414843
25.	Kel. Jongaya	0,005609868	67.	Kel. Sambungjawa	0,024454246
26.	Kel. Kaluku Bodoa	0,024892009	68.	Kel. Sinri Jala	0,00320163
27.	Kel. Kapasa	0,118758388	69.	Kel. Sudiang	0,064840417
28.	Kel. Karampuang	0,011846337	70.	Kel. Sudiang Raya	0,04241941
29.	Kel. Karunrung	0,006240782	71.	Kel. Tallo	0,013270455
30.	Kel. Karuwisi	0,001296441	72.	Kel. Tamalanrea	0,008522213
31.	Kel. Kassi-kassi	0,004369128	73.	Kel. Tamalanrea Indah	0,104508681
32.	Kel. Kunjungmae	0,000872821	74.	Kel. Tamalanrea Jaya	0,085492999
33.	Kel. Lakkang	0,154638169	75.	Kel. Tamamaung	0,006820569
34.	Kel. Layang	0,001043544	76.	Kel. Tamarunang	0,003970977
35.	Kel. Lembo	0,004408733	77.	Kel. Tanjung Merdeka	0,101607307
36.	Kel. Lette	0,004560036	78.	Kel. Tello Baru	0,12164439
37.	Kel. Maccini Gusung	0,001000394	79.	Kel. Tidung	0,000376091
38.	Kel. Maccini Sombala	0,146114329	80.	Kel. Timongan Lompoa	0,000881962
39.	Kel. Mamajang Dalam	0,001718423	81.	Kel. Tompo Balang	0,002253373
40.	Kel. Mandala	0,001808508	82.	Kel. Totaka	0,001467421
41.	Kel. Mangasa	0,014656716	83.	Kel. Untia	0,04122223
42.	Kel. Manggala	0,003263416	84.	Kel. Walawalaya	0,014843686
		<b>TOTAL LUASAN</b>			<b>2,330766944</b>

Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030

3. Kawasan sempadan danau atau Waduk ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter yang berada pada kawasan permukiman, dan kawasan riset dan pendidikan.

Pada kawasan riset dan pendidikan ditetapkan di Danau Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Kecamatan Tamalanrea dan pada kawasan permukiman ditetapkan di Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala. Umumnya danau di kota Makassar juga difungsikan sebagai area/kawasan resapan air.

#### Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang terbuka hijau yang disebut juga sebagai kawasan hijau di Kota Makassar dibagi berdasarkan bobot kealamiannya yaitu kawasan hijau lindung dan binaan. Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Sementara Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.

Rencana pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) disesuaikan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikelompokkan kedalam beberapa jenis berdasarkan tipologinya, yakni dari segi fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ruang terbuka hijau terbagai atas ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Untuk ruang terbuka hijau privat merupakan RTH milik

institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan ruang terbuka hijau publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan masyarakat secara umum. Kondisi eksisting ruang terbuka hijau Kota Makassar saat ini masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah dari alokasi total ruang terbuka hijau yang mencapai 30%.

Sesuai arahan dari undang-undang penataan ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang mengalokasikan luasan RTH sebesar 30% dengan alokasi persentase untuk RTH publik 20% dan RTH privat 10%, maka pengembangan RTH Kota Makassar didorong untuk memenuhi luasan minimal tersebut. Konsep pengembangan luas Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar dilakukan dengan membagi wilayah kota kedalam 3 kawasan dengan alokasi persentase RTH publik dan RTH privat pada masing-masing kawasan, yaitu :

- a. Kawasan kota yang sudah terbangun, arahan pengembangan RTH publik minimal 10% dari luas kawasan dan RTH privat minimal 20% dari luas kawasan;
- b. Kawasan kota yang belum terbangun arahan pengembangan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan dan RTH privat minimal 20% dari luas kawasan.
- c. Kawasan reklamasi arahan pengembangan RTH publik minimal 30% dari luas kawasan dan RTH privat minimal 20% dari luas kawasan.

Tabel.4.7

## Peta Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar



Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030

d. Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan dan melindungi kenakeragaman dan/atau keunikan alam serta situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya. Kawasan Cagar Budaya di Kota Makassar tersebar di beberapa bagian kota Makassar. Kawasan Cagar Budaya merupakan kawasan yang terdapat bangunan atau situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di kota dan patut dijaga kelestariannya. Kawasan cagar budaya ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai hasil budi daya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah. Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar budaya, meliputi pelestarian budaya, hasil budaya atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi dan khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan. Cagar budaya di Kota Makassar meliputi lingkungan bangunan non gedung dan lingkungan bangunan gedung serta halamannya yang perlu dijaga

kelestariannya. Cagar budaya yang ditetapkan dalam wilayah Kota Makassar antara lain:

1. Benteng Fort Rotterdam yang berada di Kecamatan Ujungpandang;
2. Benteng Somba Opu di Kecamatan Tamalate;
3. Makam raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo; dan
4. Bangunan Masjid Raya yang terletak di Kecamatan Bontoala.

Kawasan Budidaya Kawasan adalah wilayah yang dilihat dari fungsi utamanya. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya Kota Makassar meliputi :

a. Kawasan Perumahan

Dari rencana pengembangan kawasan permukiman dalam Tata Ruang Kota Makassar, arahan pengembangannya dikelompokkan dalam kategori pengembangan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi : Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo. Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang meliputi : sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian

Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah. Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah meliputi : sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah.

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan

Perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas : pasar tradisional (pasar tradisional skala pelayanan kota dan pasar tradisional skala pelayanan lingkungan), pusat perbelanjaan dan toko modern, rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan pada Kawasan Bisnis Global di Kecamatan Mariso. c. Perkantoran Kawasan perkantoran meliputi : kawasan perkantoran pemerintahan (tingkat provinsi tingkat kota, tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, pemerintahan pusat) dan perkantoran swasta.

d. Kawasan Industri

Kawasan Peruntukan industri meliputi : Kawasan peruntukan industri besar yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, kawasan peruntukan industri sedang, kawasan peruntukan industri kecil yang terdapat di Kecamatan Ujung pandang.

#### e. Kawasan Peruntukan Pergudangan

Kawasan peruntukan pergudangan terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Adapun rencana pengembangan kawasan pergudangan terdiri atas : kawasan pergudangan pada kawasan pelabuhan, kawasan pergudangan pada kawasan bandar udara, kawasan pergudangan pada kawasan maritime.

#### f. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata Kota Makassar meliputi : kawasan Pariwisata Budaya (benteng Fort Rotterdam, benteng Somba Opu, makam Raja-Raja Tallo, makam Pangeran Diponegoro, Monumen Korban 40.000 Jiwa, Monumen Emmy Saelan, Museum Kota, Masjid Raya, Gereja Katedral, Klenteng Ibu Agung Bahari, dan kawasan China Town), Kawasan Pariwisata Alam (pantai Losari, pantai Akkarena, pulau Kayangan, pulau Samalona, pulau Kodingareng Keke, pulau La'jukang), Kawasan Pariwisata Buatan. Secara lengkap Pola Ruang Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini

Tabel.4.8

Peta Pola Ruang Kota Makassar



Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030

## Potensi Pengembangan Wilayah

Secara struktur ruang, sistem perkotaan RTRW Kota Makassar disusun berdasarkan klasifikasi menurut sistem pusat pelayanannya sebagai berikut :

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK), untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dalam aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota dan/atau regional. PPK Kota Makassar terdiri atas 3 (tiga) PPK meliputi : PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis skala internasional, nasional, dan regional, PPK III berfungsi sebagai Pusat kegiatan maritim dengan skala internasional, nasional, dan regional di Kawasan Maritim Terpadu.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), untuk melayani sub wilayah kota dalam pelayanan internal wilayah. Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Terdapat 9 (Sembilan) sub pusat pelayanan kota dalam wilayah Kota Makassar, yaitu :

Sub PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan perumahan yang berkepadatan tinggi dan sedang dengan skala pelayanan tingkat kota. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan penelitian dan pendidikan dengan skalapelayanan tingkat nasional dan regional;

Sub PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan kebandaraan dengan skala pelayanan internasional dan nasional. Sub PPK IV berfungsi sebagai pusat kegiatan industri di Kawasan Industri Terpadu dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional.

Sub PPK V berfungsi sebagai pusat kegiatan pergudangan di Kawasan Pergudangan Terpadu dengan skala pelayanan tingkat regional. Sub PPK VI berfungsi sebagai pusat kegiatan kepelabuhanan di Kawasan Pelabuhan Terpadu dengan skala pelayanan tingkat nasional dan internasional; Sub PPK VII berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis pariwisata di Kawasan Bisnis Pariwisata Terpadu dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional. Sub PPK VIII berfungsi sebagai pusat kegiatan Budaya di Kawasan Budaya Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota. Sub PPK IX berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga di Kawasan Olahraga Terpadu dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional.

c. Pusat Lingkungan (PL), untuk melayani bagian wilayah kota dalam skala lingkungan.

Pusat kegiatan lingkungan merupakan penghubung dari pusat kegiatan lokal. Zona ini menjadi nodes yang berperan dalam kawasan local sprawl di sekitarnya yang didasarkan pada radius pelayanan yang efektif dan efisien. Pusat lingkungan meliputi kawasan-kawasan fungsional yang berperan penting terhadap kerangka struktur ruang kota. Pusat Lingkungan (PL) yang berada dalam struktur ruang Kota Makassar yaitu ditetapkan di:

Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai dan sekitarnya di Kecamatan Tamalanrea. Kawasan Antang dan sekitarnya di Kecamatan Manggala dan Kawasan Gunung Sari dan sekitarnya di Kecamatan Rappocini. Adapun rencana Struktur Ruang Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ancaman bencana di Kota Makassar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Bencana yang disebabkan oleh Faktor Alam dan Faktor Non Alam. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, resiko cuaca ekstrim, epidemi dan wabah. Ancaman Bencana yang disebabkan Faktor Non Alam yaitu Kebakaran Gedung dan Pemukiman, dan Epidemii dan Wabah Penyakit, Konflik Sosial.

Banjir Berdasarkan topografinya, kota Makassar dikategorikan sebagai dataran landai dengan ketinggian mencapai 1-22 m dpl. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya banjir atau luapan air yang juga didukung oleh sistem drainase kota yang belum optimal. Kawasan yang sering mengalami banjir terkonsentrasi di daerah dengan elevasi 1-4 m dpl serta pada daerah dengan sistem drainase yang tidak memadai. Selain itu Kota Makassar juga sangat dipengaruhi oleh proses sungai yang bersumber dari sungai utama yang melewati kota ini, yaitu Sungai Tallo, Sungai Pampang dan Sungai Jene'berang.

Kondisi morfologi ini berperan penting dan sekaligus menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di kota Makassar. Daerah-daerah yang menjadi langganan banjir pada umumnya merupakan daerah rendah, yang terletak di

sepanjang daerah aliran Sungai Tello dan daerah aliran Sungai Jenneberang serta sepanjang Sungai Pampang. Pada tahun 2013 banjir dan genangan terjadi pada 8 kecamatan (Tamalanrea, Manggala, Bringkanaya, Panakukang, Rappocini, Ujung Pandang, Wajo dan Ujung Tanah) dengan jumlah korban sebanyak 47.028, dengan kerusakan bangunan sebanyak 18.637 unit dengan perkiraan kerugian kurang lebih sebesar 11,7 milyar.

Daerah banjir selanjutnya adalah daerah-daerah hulu atau bagian tengah dari suatu daerah layanan, seperti kawasan Antang, Minasa Upa, sekitar Pelabuhan dan sekitar Jalan Tol. Berdasarkan peta terdampak banjir Kota Makassar di atas, terlihat wilayah banjir berdasarkan ketinggian genangannya. Ketinggian banjir tertinggi berada di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala sekitar 300 cm, dimana sebagian besar wilayah terdampaknya hanya di bantaran sungai Tallo dengan penggunaan lahan berupa sawah. Wilayah Kota Makassar yang sering terdampak bencana banjir dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini :

Tabel.4.9

Genangan Air/Banjir yang terjadi Kota Makassar

Periode 2009-2013

Tahun	Kecamatan Terdampak	Jumlah		Kerusakan Bangunan	Kerugian (Rp.Juta)
		KK	Jiwa		
2009	12	511	540	1501	950
2010	2	476	470	-	950
2011	8	1508	2058	1488	3.72
2012	9	654	2397	462	1.15
2013	8	12.291	47.028	18.637	11.69

Sumber : BPBD Kota Makassar 2009-2013

Demografi Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway namun diposisikan sebagai ruang keluarga (living room) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.4.10

## Jumlah Penduduk dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar

Kecamatan	Populasi Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
	2012	2013	
Mariso	56.989	56.578	0,59
Mamajang	60.172	58.087	-0,35
Tamalate	174.282	182.939	2,89
Rappocini	154.101	156.665	1,81
Makassar	83.328	81.054	-0,25
Ujung Pandang	27.440	26.477	-0,94
Wajo	24.942	27.556	-1,76
Bontoala	55.278	52.631	-0,88
Ujung Tanah	47.618	46.836	0,21
Tallo	136.972	138.419	1,10
Panakkukang	144.199	144.997	0,94
Manggala	119.409	130.943	4,24
Biringkanaya	171.084	195.906	5,88
Tamalanrea	105.249	108.984	2,14
<b>Makassar</b>	<b>1.361.063</b>	<b>1.408.072</b>	<b>1,78</b>

Sumber: BPS/Makassar Dalam Angka 2013/INKESRA Kota Makassar 2014

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut Kecamatan terdapat di Kecamatan Tamalate sejumlah 172.506 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,48 sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ujung Pandang sejumlah 27.160 dengan laju pertumbuhan (0,73).

Tabel.4.11

Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar

Kode Wilayah	Kecamatan	Persentase	Kepadatan Penduduk
10	Mariso	4,17	30,993
20	Mamajang	4,40	26,471
30	Tamalate	12,76	8,536
31	Rappocini	11,28	16,526
40	Makassar	6,10	32,730
50	Ujung Pandang	2,01	10,327
60	Wajo	2,19	14,894
70	Bontoala	4,05	26,054
80	Ujung Tanah	3,49	7,935
90	Tallo	10,03	23,254
100	Panakkukang	10,56	8,371
101	Manggala	8,74	4,896
110	Biringkanaya	12,52	3,512
111	Tamalanrea	7,70	3,272
7371	Makassar	100	7,693

Sumber: BPS/Makassar Dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel persentase penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 12,52% dengan tingkat kepadatan penduduk 3,512 sementara kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Makassar dengan persentase penduduk 6,10%. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian bahwa luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang kecil.

Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan

pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Salah satu indikator kemajuan pendidikan suatu daerah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

APS Kota Makassar terus mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan. APS jenjang pendidikan dasar meningkat sebesar 3,94%, SMP/MTs meningkat sebesar 4,42% dan SMA/SMK/MA meningkat sebesar 11,1%. Dari semua jenjang pendidikan, kenaikan tertinggi dicapai oleh jenjang pendidikan menengah atas. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Makassar per jenjang pendidikan tahun 2009 – 2013.

b. Rasio Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 2009-2013, kemampuan penyediaan sekolah untuk penduduk usia sekolah relatif mendatar. Rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar, tahun 2013 rata-rata setiap sekolah menampung 282 orang penduduk usia 7-12 tahun atau 10.000 penduduk dilayani oleh 35,5 sekolah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Menengah Pertama, tahun 2013 rasionya 1 : 342 siswa atau untuk 10.000 penduduk usia 13-15 tahun dilayani oleh 29 sekolah. Untuk jenjang Menengah Atas rasionya 1 sekolah menampung 359 siswa, atau untuk 10.000 penduduk usia 16-18 tahun dilayani

oleh 28 gedung sekolah. Grafik Rasio Sekolah/Murid ini relatif datar dapat disebabkan oleh karena menurunnya pertumbuhan penduduk, sehingga penduduk usia sekolah menurun jumlahnya sedangkan gedung sekolah bertambah.

Angkatan Kerja (Labor Force) Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukanangkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 TPAK Kota Makassar sebesar 54,79, meningkat menjadi 57,94% tahun 2013. Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4.12

## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009-2013

## Kecamatan Kota Makassar

No.	Tahun	T P A K
1	2009	51,95
2	2010	53,18
3	2011	55,07
4	2012	54,79
5	2013	57,94

Sumber : Indikator Makro Kota Makassar,2013

Tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas. TPAK Kota Makassar tahun 2012 sebesar 57,9% dengan tingkat pengaguran sebesar 9,8% dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 52%.

#### Profil Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

### VISI

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

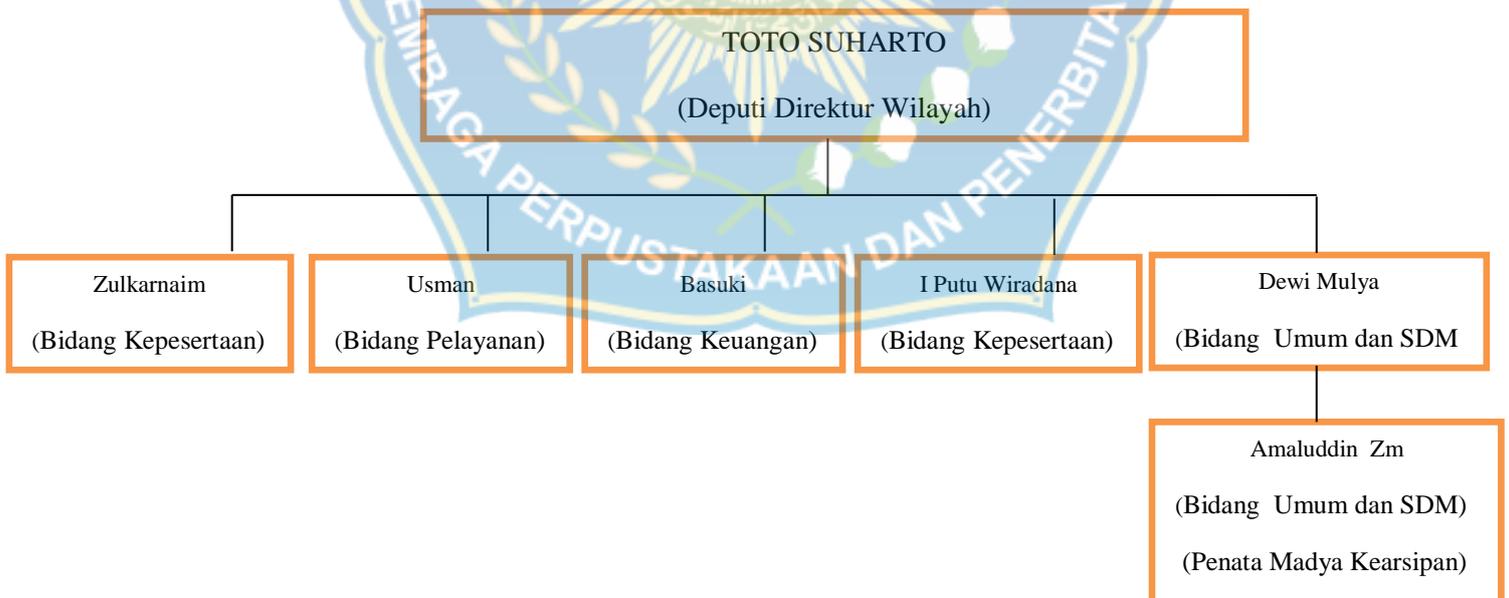
### MISI

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

- Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

### STRUKTUR ORGANISASI

#### KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN KANWIL SULAWESI – MALUKU



## **B. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Tata Kota Makassar**

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Makassar yang mengacu kepada indikator *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Wibisono, 2007.

*Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetap juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR adalah bagian dari perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik sebagai suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian diantaranya :

### 1. Keuntungan (*profit*)

Pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Untuk memberikan gambaran mengenai keuntungan terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan RTH, maka dilakukan wawancara dengan informan Am, selaku Kepala Bidang Umum dan SDM mengemukakan bahwa :

“Mengenai kerjasama kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemprov iya benar ada. Kami memanfaatkan CSR untuk berkerjasama dengan Pemprov. Kami menghadap ke Pak Gubernur untuk meminta lahan yang dapat dijadikan sebagai kawasan RTH karena pada saat itu Programnya RTH dan pada saat itu Pak Gubernur menyarankan lokasinya di kawasan CPI (*Center Point*) dan kami membuat *MoU* dan Perjanjian kerjasama sudah dibuat maka anggaran dan pengelolaan kami yang kerjakan menggunakan CSR, jika melihat keuntungan saat ini masih belum bisa terlihat tapi kami mengharapkan kedepannya dengan adanya pembangunan RTH dari kantor BPJS Ketenagakerjaan di kawasan CPI (*Center Point*) masyarakat jadi mengetahui kalau kantor BPJS bukan cuman Kesehatan saja melainkan ada juga kantor BPJS Ketenagakerjaan (Hasil Wawancara Informan Am, Tanggal 09 Agustus 2019).

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai keuntungan terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemprov dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) Sebagai bahan promosi atau tahap mengenalkan ke masyarakat bahwa kantor BPJS bukan cuman Kesehatan melain memiliki juga kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selain penjelasan dari kepala bidang Umum dan SDM, adapun penjelasan dari informan Hr, selaku kepala bidang Kepesertaan mengemukakan bahwa :

“Sebelumnya gagasan ini sudah ada dari tahun lalu untuk melakukan pembangunan RTH di Area *Center Point of Indonesia* (CPI) adanya pembangunan *Landmark*. Kami dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan dana dan ikut serta dalam pembangunan dengan menunjuk pengelola pembangunan dan kontraktornya, Jika melihat dari segi keuntungan saat ini belum dapat di lihat tetapi kami mengharapkan sebagai bahan promosi mengenai kantor BPJS Ketenagakerjaan karena selama ini masyarakat umum hanya mengetahui kantor BPJS Kesehatan jadi kami mengharapkan sebagai bahan untuk mengenalkan ke masyarakat tentang kantor BPJS Ketenagakerjaan. (Hasil Wawancara Informan Hr, Tanggal 15 Juli 2019).

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai keuntungan terkait kerjasama Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah

Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) Sebagai bahan promosi tujuannya untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa kantor BPJS bukan cuman Kesehatan saja melain memiliki juga memiliki kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas keuntungan terkait Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan adanya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) diharapkan sebagai bahan promosi tujuannya untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa kantor BPJS bukan cuman Kesehatan saja melain memiliki juga memiliki kantor BPJS Ketenagakerjaan dan terkait keuntungan masyarakat adalah dapat menikmati udara segar , sehat , bersantai-santai dan dapat berolahraga sekitar di *Center Point of Indonesia* .Jika melihat yang terjadi di lapangan benar adanya terjadinya sebagai bahan promosi mengenalkan ke masyarakat bahwa kantor BPJS bukan cuman ada kesehatan tetapi ada juga kantor BPJS Ketenagakerjaan terbukti dengan adanya pembanguan ruang terbuka hijau di *Center Point of Indonesia* dengan memberikan tanda disekitar pembangunan ada tulisan mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan adanya tempat-tempat berolahraga dan bersantai-santai sambil menikmati udara yang segar . hal ini sejalan juga dengan teori Ardianto dan Machfudz mengenai CSR yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

## 2. Manusia(*people*)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Perusahaan perlu memandang bahwa CSR adalah investasi masa depan, artinya CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*), melainkan sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang, karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan. Untuk memberikan gambaran mengenai Masyarakat terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan RTH, maka dilakukan wawancara dengan informan Am, selaku Kepala Bidang Umum dan SDM mengemukakan bahwa :

“Jika melihat kondisi masyarakat saat ini masyarakat sudah mulai ramai mengunjungi awalnya masyarakat hanya ingin melihat Masjid 99 Kubah akan tetapi sebelum kesana masyarakat harus melewati terlebih dahulu taman kami dan disana bisa menikmati mengambil foto dan di Kawasan itu ada taman bermain dan memiliki area futsal sedangkan mengenai melibatkan masyarakat kami tetap melibatkan masyarakat lokal untuk sebagai pekerja bangunan tidak hanya dari pekerja pulau Jawa.  
(Hasil Wawancara Informan Am, Tanggal 09 Agustus 2019).

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai masyarakat terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang

meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) kondisi masyarakat sangat antusias dengan adanya kawasan taman dan area bermain bisa merasakan kenyamanan selain itu masyarakat pekerja lokal di libatkan dalam pembangunan Selain penjelasan dari kepala bidang Umum dan SDM, adapun penjelasan dari informan Hr, selaku kepala bidang Kepesertaan mengemukakan bahwa :

“Melihat tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya kawasan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) masyarakat sangat antusias berkunjung dan menikmati alam sekitar dengan adanya berbagai area disediakan taman bermain kalau masalah melibatkan masyarakat sekitar mengenai kerjasama ini seperti menghadiri rapat kami tidak melibatkan karena ini hanya bentuk kerjasama dengan Pemerintah Provinsi tetapi kami tetap melibatkan pekerja lokal untuk pembangunan ini. (Hasil Wawancara Informan Hr, Tanggal 15 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Kepesertaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan diketahui bahwa dalam kondisi masyarakat saat ini sangat antusias berkunjung untuk menikmati alam sekitar berbagai area disediakan sehingga masyarakat merasakan nyaman. hal ini salah satu tujuan kantor BPJS Ketenagakerjaan masyarakat dapat menikmati RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*).

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi masyarakat terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan RTH, maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat Rn salah satunya mengemukakan bahwa :

“Iya saya mengetahui ada pembangunan RTH di CPI ,sangat setuju dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan *Center Point* ,jadi kami masyarakat bisa menikmati udara segar dengan

adanya ruang terbuka hijau seperti taman-taman yang bisa merasakan kenyamanan saat berkunjung kawasan *Center Point*.(Hasil Wawancara Informan Rn, Tanggal 28 Juni 2019)

Adapun juga disampaikan informan masyarakat Ay,Selaku pedagang yang mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan *Center Point*, jadi kami sebagai pengunjung bisa merasakan nyaman menikmati udara segar dan kami pun bisa sekalian memanfaatkan sebagai lahan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari(Tanggal 02 September 2019)

Hal ini senada juga disampaikan informan masyarakat Rs,Selaku pedagang yang mengemukakan bahwa :

“Saya setuju dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan *Center Point* .Selain itu juga masyarakat sekitar bisa dapat berkunjung sambil menikmati alam sekitar sehingga pengunjung banyak berdatangan dan kami pun sebagai pedagang kecil bisa mengambil kesempatan untuk berdagang disekitar CPI (Tanggal 02 September 2019)

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai masyarakat terkait Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI) melihat kondisi masyarakat sangat antusias dengan adanya kawasan taman dan area bermain bisa merasakan kenyamanan selain itu masyarakat pekerja lokal di libatkan dalam pembangunan dan membuat masyarakat pekerja lokal jadi produktif dengan adanya pembangunan RTH selain itu juga berdampak juga kepada penjual-penjual sekitar lokasi CPI menjadi ramai berkunjung untuk beristirahat dan berbelanja sehingga berdampak positif juga tetapi ada juga

berdampak negatifnya yaitu mengakibatkan kemacetan di akibat keramaian pengunjung.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas Mengenai masyarakat terkait Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan *Center Point of Indonesia*(CPI), jika melihat kondisi masyarakat yang terjadi di lapangan masyarakat sangat antusias datang untuk menikmati dan berolahraga dengan adanya kawasan taman , area bermain dan berolahraga sehingga bisa merasakan kenyamanan selain itu masyarakat dengan adanya pembangunan RTH selain itu juga berdampak juga kepada penjual-penjual sekitar lokasi CPI menjadi ramai, terbukti jika melihat terjadi di lapangan terdapat pengunjung untuk beristirahat dan terdapat pedagang-pedagang kecil yang berjualan disekitar *Center Point Indonesia* sehingga mengakibatkan kemacetan di akibat keramaian pengunjung yang bersinggahan. hal ini sejalan juga dengan teori Ardianto dan Machfudz mengenai CSR yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

### 3. lingkungan (*planet*)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita, sebaliknya jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Sebagian besar kita kurang peduli dengan lingkungan sekitar, hal ini

antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya, padahal dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya..Untuk memberikan gambaran mengenai lingkungan terkait kerjasama Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH,maka dilakukan wawancara dengan informan Am, selaku Kepala Bidang Umum dan SDM mengemukakan bahwa :

“Jika melihat resiko dampaknya lingkungannya kami belum dapat mengetahui tetapi jika melihat masyarakat saat ini sangat antusias berkunjung Kawasan *Center Point* harapan kami Masyarakat dapat bersantai dan menikmati ruang terbuka hijau dengan nyaman menikmati udara segar.(Hasil Wawancara Informan Am,Tanggal 09 Agustus 2019).

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai lingkungan terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemprov dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) jika dampaknya belum dapat mengetahui tetapi kantor BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan lingkungan sekitar Kawasan *Center Point* Indonesia dapat memberikan rasa kenyamanan menikmati udara segar dengan adanya RTH. Selain penjelasan dari kepala bidang Umum dan SDM, adapun penjelasan dari informan Hr,selaku kepala bidang Kepesertaan mengemukakan bahwa :

“jika melihat analisis dampak lingkungan di kawasan *Center Point* tidak beranalisis dampak karena di Kawasan *Center Point* adalah wilayah Reklamasi dan kami juga sudah membuat drainase air agar tidak

terjadi banjir dan masyarakat dapat merasakan nyaman menghirup udara segar.(Hasil Wawancara Informan Hr, Tanggal 15 Juli 2019)

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai lingkungan terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI ( *Center Point of Indonesia*) jika melihat analisis dampaknya tidak beranalisis dampak karena di Kawasan *Center Point* adalah wilayah reklamasi dan kantor BPJS Ketenagakerjaan sudah membuat drainase air agar tidak mengalami banjir dan mengharapkan lingkungan sekitar Kawasan *Center Point* dapat memberikan rasa kenyamanan menikmati udara segar dengan adanya RTH.

Selanjutnya adapun penjelasan dari informan masyarakat untuk mengetahui kondisi lingkungan terkait Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau(RTH),maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat salah satunya An yang mengemukakan bahwa :

“Iya saya setuju dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan *Center Point*,jika melihat kondisi lingkungan di sekitar *Center Point* menjadi indah sekaligus kami pengunjung bisa merasakan nyaman menikmati udara segar yang jauh dari asap kendaraan dan saya baru sadari kalau yang mengelolah atau membangun ruang terbuka hijau adalah Kantor BPJS Ketenagakerjaan (Tanggal 02 September 2019)

Hal senada juga disampaikan informan masyarakat Rn mengemukakan bahwa:

“ melihat kondisi lingkungan disana belum terlihat dampak yang dapat merugikan seperti banjir dengan adanya RTH kalau dampak reklamasi ada tetapi kami masyarakat mengharapkan dengan adanya RTH dapat

mengurangi dampaknya dan dapat membuat lingkungan sekitar jadi sehat dan nyaman..(Hasil Wawancara Informan Rn, Tanggal 28 Juni 2019)

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai lingkungan terkait kerjasama Kantor BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dari BPJS Ketenagakerjaan di Kawasan CPI (*Center Point*) masyarakat setuju dengan adanya pembangunan ruang terbuka hijau membuat di sekitar kawasan Center Point Indonesia menjadi indah sekaligus merasakan kenyamanan dan jika melihat dampak lingkungannya masyarakat mengharapkan lingkungan sekitar Kawasan *Center Point* Indonesia dapat mengurangi dampaknya seperti banjir setelah adanya ruang terbuka hijau dan dapat memberikan rasa kenyamanan menikmati udara segar.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas mengenai lingkungan sekitar dampaknya belum dapat terlihat tetapi dari pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan masyarakat dapat merasakan nyaman dan dapat bersantai-santai menikmati udara segar di ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*, jika melihat terjadi di lapangan banyak masyarakat berdatangan untuk bersantai-santai menikmati udara segara dan jika melihat dampak yang dapat merugikan seperti banjir secara langsung belum dapat diketahui tetapi kantor BPJS Ketenagakerjaan sudah membuat drainase sekitar Kawasan *Center Point of* Indonesia ,jika melihat yang terjadi dilapangan belum terlihat dampak negatif yang dapat merusak lingkungan dan terdapat juga drainase yang sudah di buatkan untuk mengatasi dampak banjir.hal ini sejalan juga dengan teori Ardianto

dan Machfudz mengenai CSR yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan *Corporate Social Responsibility* atau tanggungjawab sosial perusahaan kantor BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu pada indikator *Corporate Social Responsibility* (Wibisono, 2007) yaitu dengan adanya keuntungan, adanya manusia atau masyarakat dan adanya lingkungan. Menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut sudah dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat sedikit kendala.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat *Corporate Social Responsibility* atau tanggungjawab sosial perusahaan kantor BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan adanya keuntungan yang dapat diperoleh terhadap keterlibatan kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi mengenai pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point* dalam pemanfaatan CSR untuk meningkatkan tata kota makassar yang meliputi pembangunan RTH di Kawasan CPI (*Center Point of Indonesia*) diharapkan sebagai bahan promosi tujuannya untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa kantor BPJS bukan cuman Kesehatan saja melainkan memiliki juga memiliki kantor BPJS Ketenagakerjaan dan terkait keuntungan masyarakat adalah dapat menikmati udara segar , sehat , bersantai-santai dan dapat berolahraga sekitar di *Center Point of Indonesia* karena hal ini terkait sebagai salah satu program jaminan hari tua

Sementara pada indikator manusia atau masyarakat menunjukkan kondisi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya pembangunan RTH di Kawasan *Center Point* yang dapat menikmati taman sekitar selain itu masyarakat pekerja lokal di libatkan dalam pembangunan Sehingga masyarakat pekerja lokal mendapatkan penghasilan ekonomi dan membuat masyarakat pekerja lokal jadi produktif dengan adanya pembangunan RTH selain itu juga berdampak juga kepada penjual-penjual sekitar lokasi CPI menjadi ramai berkunjung untuk beristirahat dan berbelanja sehingga berdampak positif juga tetapi ada juga berdampak negatifnya yaitu mengakibatkan kemacetan di akibat keramaian pengunjung yang bersinggahan.

Kemudian mengenai lingkungan sekitar dampaknya belum dapat terlihat tetapi dari pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan masyarakat dapat merasakan nyaman dan dapat bersantai-santai menikmati udara segar di ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*. Jika melihat dampaknya secara langsung belum dapat diketahui tetapi kantor BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan lingkungan sekitar Kawasan *Center Point* yang sudah dibuatkan ruang terbuka hijau dapat memberikan rasa kenyamanan menikmati udara segar dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu dapat mengurangi dampak udara tidak segar dan dapat membuat lingkungan sekitar menjadi sehat dan nyaman

Kemudian kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu terkendala mengenai pengerjaan yang dimana bahan material pembangunan terkadang terjadi penahanan di pintu gerbang masuk ke makassar.

### **C. Faktor Pendukung dan penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar.**

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau ,maka dapat dilihat dari segala hal yang dapat mendukung dan mendorong pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*. Sementara itu faktor penghambat dilihat dari segala hal yang menjadi kendala yang ditemukan dalam proses pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan pada bagian berikut:

#### 1. Faktor Pendukung

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung dan mendorong pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point* dengan berjalan baik.maka akan melakukan wawancara dengan informan Hr, selaku kepala bidang kepesertaan mengemukakan bahwa:

“Salah Satu adanya dukungan pemerintah kota makassar terhadap kerjasama mengenai pembangunan ruang terbuka hijau selama tahap pengerjaan cukup bagus dan adanya regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh provinsi maupun di kota Makassar sendiri seperti adanya peraturan Peraturan Gubernur yang menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerjadan begitupun hubungan kami dengan Pemprov maupun kota Makassar saling koordinasi dilapangan mengenai pengawasan saling timbal balik jadi selama terjalin hubungan baik

masalah kendala bisa dapat di selesaikan dengan baik. (Hasil Wawancara Informan Hr, Tanggal 15 Juli 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Am selaku kepala bidang Umum dan SDM mengenai faktor pendukung pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point* dengan berjalan baik. Informan Am mengemukakan bahwa :

“Faktor pendukung kami adanya dukungan dari Pemprov karena ketika ada hambatan dari pihak Pemprov yang akan menyelesaikan dengan baik dan soal anggaran kami miliki dari anggaran kita sendiri. (Hasil Wawancara Informan Am, Tanggal 09 Agustus 2019).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukungnya adanya dukungan Pemerintah Provinsi yang memberikan hubungan yang saling *respon* atau tanggapan melalui bantuan dalam menyelesaikan pembangunan dan pengawasan terhadap pembangunan RTH di Kawasan *Center Point* adalah merupakan faktor pendukung.

## 2. Faktor Penghambat

Pada penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mengenai faktor penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point* menjadi terkendala .maka akan melakukan wawancara dengan informan Hr,selaku kepala bidang kepesertaan mengemukakan bahwa:

“Jika melihat dari segi hambatan ada kendala yang menghambat pengerjaan seperti bahan matrial pembangunan telat datang yang di akibatkan terjadinya penahanan di gerbang masuk ke kota makassar oleh karena kami berkoordinasi kepada pihak Pemprov dan menyelesaikan.(Hasil Wawancara Informan Hr, Tanggal 15 Juli 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Am selaku kepala bidang Umum dan SDM mengenai faktor penghambat yang menjadi kendala pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan Center Point . Informan Am mengemukakan bahwa :

“Faktor penghambat kita adalah adanya penahanan bahan-bahan material yang di tahan di lokasi pintu masuknya ke makassar padahal kami sudah memiliki surat izin dan berlogokan Pemprov dan kami akan tetap koordinasi dengan Pemprov(Hasil Wawancara Informan Am,Tanggal 09 Agustus 2019).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya faktor penghambat yang menjadi kendala pembangunan yaitu adanya penahan bahan matrial pembangunan yang akan masuk ke pintu gerbang ke makassar sehingga waktu pengerjaan tertunda dan itulah faktor penghambat dalam pembangunan RTH di Kawasan *Center Point*.

Secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*.adanya dukungan Pemerintah Provinsi yang memberikan hubungan yang baik dalam menyelesaikan pembangunan dan pengawasan terhadap pembangunan RTH di Kawasan *Center Point* dan adanya adanya regulasi yang sudah dikeluarkan oleh provinsi maupun di kota Makassar sendiri seperti adanya peraturan Walikota dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa kewajiban Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja dan

begitupun hubungan kami dengan Pemerintah Provinsi maupun kota Makassar saling koordinasi dilapangan mengenai pengawasan saling timbal balik jadi selama terjalin hubungan baik masalah kendala bisa dapat di selesaikan dengan baik.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*.Adanya kendala yang menghambat pengerjaan seperti bahan matrial pembangunan telat datang yang di akibatkan terjadinya penahanan di gerbang masuk ke kota makassar.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya tentang pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*, maka dapat disimpulkan secara Keseluruhan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota di kota makassar yang mengacu kepada indikator *Corporate Social Responsibility* (Wibisono,2007) Yaitu dengan adanya Keuntungan atau *profit*,adanya masyarakat atau *people*,dan lingkungan atau *planet* menunjukkan bahwa sudah efektif bagi pelaksana CSR dan masyarakat meskipun masih sedikit terdapat kelemahan.

faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point* . Faktor pendukung adanya dukungan Pemerintah Provinsi yang memberikan hubungan yang baik dalam menyelesaikan pembangunan dan pengawasan terhadap pembangunan RTH di Kawasan *Center Point* dan adanya adanya regulasi yang sudah dikeluarkan oleh provinsi maupun di kota Makassar sendiri seperti adanya peraturan Walikota dan peraturan Gubernur yang menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan janinan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja dan begitupun hubungan kami dengan Pemerintah Provinsi maupun kota Makassar saling koordinasi dilapangan mengenai pengawasan saling timbal balik jadi

selama terjalin hubungan baik masalah kendala bisa dapat di selesaikan dengan baik.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point* .Adanya kendala yang menghambat pengerjaan seperti bahan matrial pembangunan telat datang yang di akibatkan terjadinya penahanan di gerbang masuk ke kota makassar.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran penulis yang akan dikemukakan untuk dapat dijadikan peningkatan pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan tata kota Makassar yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Kawasan *Center Point*, yaitu :

1. perlu adanya hubungan lebih baik antara kantor BPJS Ketenagakerjaan , dengan pihak yang mengawasi di gerbang masuknya ke Makassar agar tidak ada lagi penahanan bahan matrial pembangunan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pengerjaan
2. Perlu adanya tambahan wilayah untuk parkir kendaraan motor dan mobil agar tidak terjadi kemacetan .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, J. (2008). *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Ardianto, Elvinaro dan Muchfudz, D. (2011). *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR No Title*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Budiharjo, Eko dan Sujarto, D. (2009). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Hidayat, W. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Long Ikis Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1637–1651.
- Prastowo, Joko dan Miftachul, H. (2011). *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Pratama Ardi, Yeremia dan Widjaya, G. (2008). *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Rahman, R. (2009). *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta: Buku Kita.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, Muchlas M dan Nahrudin, Z. (2017). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimilisas Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.1 (Ruang Terbuka Hijau).
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggungjawab sosial,dan lingkungan sumberdaya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat dalam laporan keuangan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Wahyudi, I. dan B. A. (2008). *Corporate Social Responsibility ,Prinsip Pengaturan & Implementasi*. Malang: In- Trans Publishing.

Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Surabaya: Fascho Publishing.

Witoelar, E. (2007). *Tata Ruang Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Pada Forum Nasional Tata Ruang di Jakarta.



LAMPIRAN



Foto Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan



Foto Dengan Kepala Bidang Kepesertaan



Foto Dengan Masyarakat



Foto dengan pedagang



Foto Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan





Foto dengan kepala bidang Umum dan SDM







Foto Lokasi Pembangunan RTH BPJS Ketenagakerjaan di Center Point

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Janwar Rachmat Dg. Sibale Abas. Lahir Ujung Pandang , Tanggal 01 Januari 1997. Alamat BTN. Pao-Pao Permai Blok C/8, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu . Anak ke empat dari empat bersaudarah , dari pasangan Dg. Sibale dan Djani Abas.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Percontohan PAM Kota Makassar dan selesai pada Tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 21 MAKASSAR dan selesai pada tahun 2012, dan selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 08 MAKASSAR dan selesai tahun 2015 dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan . Penulis Sangat Bersyukur , karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.



Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar  
integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email : fisip@unismuh.ac.id  
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1104/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar

H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Janwar Rachmat Dg Sibale Abas  
S t a m b u k : 10564.02323.15  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Kota  
Makassar  
Judul Skripsi : **“ Pemanfaatan Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar ”**

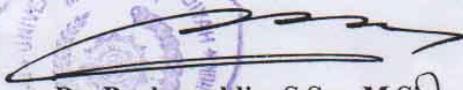
Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 13 Mei 2019

Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM : 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1609/05/C.4-VIII/V/1440/2019

17 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

22 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1104/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 13 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : JANWAR RACHMAT DG. SIBALE ABAS

No. Stambuk : 10564 02323 15

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pemanfaatan Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Tata Kota di Kota Makassar"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 16785/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan  
Kesehatan Ketenagakerjaan Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1609/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **JANWAR RACHMAT DG. SIBALE ABAS**  
Nomor Pokok : 105640232315  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PEMANFAATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN TATA KOTA DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Mei s/d 25 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 24 Mei 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. *Pertinggal.*